



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PUPUK INDONESIA GROUP
UNIT KERJA : PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

I. DATA PRIBADI

1. Nama : BAGUS SUBEKTI
2. Jabatan : SENIOR VICE PRESIDENT
3. NHK : 253143

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 3.447.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/200 m2 di KAB / KOTA KEDIRI, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
2. Tanah Seluas 1173 m2 di KAB / KOTA KEDIRI, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/45 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 575.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 33 m2/33 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 48 m2/48 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 373 m2/300 m2 di KAB / KOTA KEDIRI, HASIL SENDIRI Rp. 452.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 473.300.000**

1. MOBIL, DAIHATSU XENIA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOBIL, TOYOTA VIOS SEDAN Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
3. MOTOR, HONDA AT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
4. MOBIL, HONDA MICRO / MINIBUS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 213.900.000
5. MOTOR, HONDA AT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 19.400.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 255.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.185.721.474
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	6.361.021.474
III. HUTANG	Rp.	36.966.501
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.324.054.973

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.